

**PERSEPSI MASYARAKAT KOTA BENGKULU
PADA KAMPANYE POLITIK PEMILIHAN GUBERNUR PROVINSI BENGKULU
2020 DIMASA PANDEMI COVID-19**

Sarrah Kurnia Fadhillah, Marlisna Br. Saragih
Program Studi Ilmu Komunikasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Bengkulu

Email : sarahfadhillah18@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi masyarakat kota Bengkulu pada pelaksanaan kampanye politik yang dilakukan oleh calon Kepala Daerah khususnya pada pemilihan kepala daerah pasangan calon gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2020 di masa krisis pandemi Covid-19 saat ini. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yaitu peneliti akan mendeskripsikan, menganalisis dan menjelaskan persepsi masyarakat Kota Bengkulu pada pelaksanaan kampanye politik pemilihan gubernur Provinsi Bengkulu di Tahun 2020 di masa pandemi covid-19. Pada penelitian ini data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi non partisipan dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Pilkada dan kampanye politik yang dilakukan oleh ketiga pasangan calon gubernur Provinsi Bengkulu pada situasi pandemi Covid-19 ini menuai kontroversi di kalangan masyarakat. Banyak sekali masyarakat yang menilai bahwa pelaksanaan pilkada dan kampanye yang dilakukan ini dapat memicu kluster baru penyebaran Covid-19 sehingga berdampak dengan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap adanya virus Covid-19 ini.

Kata Kunci : Persepsi, Kampanye Politik, Pemilihan Gubernur, Covid 19

ABSTRACT

This study aims to analyze the perceptions of the people of Bengkulu city on the implementation of political campaigns carried out by regional head candidates, especially in the regional head election for the candidate pair for governor of Bengkulu Province in 2020 during the current Covid-19 pandemic crisis. This study uses a descriptive qualitative method, namely the researcher will describe, analyze and explain the perceptions of the people of Bengkulu City on the implementation of the Bengkulu Province governor election political campaign in 2020 during the Covid-19 pandemic. In this study the data were obtained through in-depth interviews, non-participant observation and documentation. The results of this study indicate that the implementation of the Pilkada and political campaigns carried out by the three pairs of candidates for governor of Bengkulu Province during the Covid-19 pandemic situation is reaping controversy among the community. Lots of people think that the implementation of the elections and the campaign being carried out can trigger a new cluster of the spread of Covid-19 so that it has an impact by decreasing the level of public confidence in the existence of this Covid-19 virus.

Keywords : Perception, Political Campaign, Gubernur Election, Covid-19

PENDAHULUAN

Dalam pengambilan keputusan. Salah satu ciri-ciri negara demokrasi adalah menempatkan rakyat pada posisi tertinggi dalam mengatur jalannya pemerintahan. Mengingat kedaulatan rakyat menjadi kekuasaan tertinggi, sehingga partisipasi rakyat dalam menjalankan pemerintahan sangat penting. Semakin baik budaya politik yang ada suatu negara maka semakin kuat demokrasi yang ada pada negara tersebut (Zainal, 2015).

Sistem demokrasi ini juga berpengaruh pada sistem pemilihan yang ada, sistem pemilihan umum yang dianut oleh negara demokrasi dimana rakyatnya harus dilibatkan pada pemilu tidak terkecuali. Pemilihan umum pada hakekatnya yakni untuk partisipasi politik masyarakat. Berdasarkan Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomer 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum menjelaskan bahwa pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Proses pemilihan umum terdapat organisasi-organisasi yang memiliki tujuan visi dan misi yang berbeda-beda namun tujuan utamanya adalah untuk

memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat Indonesia merupakan negara serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Organisasi inilah yang nantinya akan bersaing untuk mendapatkan kursi jabatan pada pemilihan yang berlangsung.

Pilkada serentak 2020 akan dilaksanakan pada 9 Desember mendatang dan sistem pilkada ini merupakan yang keempat kalinya diselenggarakan di Indonesia. Berdasarkan informasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia total daerah yang akan melaksanakan pilkada serentak ini adalah sebanyak 270 daerah dengan rincian 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota salah satunya adalah Provinsi Bengkulu. Pilkada serentak 2020 ini mengalami berbagai pro dan kontra dari masyarakat, organisasi sosial, lembaga pemerintahan dan lain sebagainya. Pasalnya saat ini pandemi Covid-19 masih menjadi permasalahan utama oleh seluruh dunia bukan hanya Indonesia. Mengingat bahwa semakin meningkatnya kasus positif Covid-19 di Indonesia sehingga membuat keresahan dimasyarakat agar pilkada ini ditunda pelaksanaannya. Tetapi realitanya pelaksanaan pilkada serentak ini tetap berjalan.

“Mencermati seluruh tahapan yang sudah dan sedang berlangsung masih

sesuai sebagaimana yang telah direncanakan dan situasi yang masih terkendali, maka Komisi II DPR RI bersama Menteri Dalam Negeri, Ketua KPU RI, Ketua Bawaslu RI dan Ketua DKPP RI menyepakati bahwa pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 tetap dilangsungkan pada 9 Desember 2020,” ujar Doli (news detik.com, 22 Oktober 2020).

Pelaksanaan pilkada tetap dilaksanakan namun harus tetap mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Selain itu Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia membuat aturan kepada masing-masing paslon untuk melakukan kegiatan politik sesuai standar operasional. Aturan ini dimuat pada Peraturan KPU Nomer 13 tahun 2020 tentang pelaksanaan pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau wali kota dan wakil wali kota serentak lanjutan dalam kondisi bencana nonalam coronavirus disease 2019. Kegiatan-kegiatan yang diatur pada pasal 57 huruf g yakni rapat umum, kegiatan kebudayaan berupa pentas seni, panen raya, dan atau konser musik, kegiatan olahraga berupa gerak jalan santai atau sepeda santai. Kegiatan-kegiatan yang memicu akan terjadinya kerumunan massa dilarang untuk dilaksanakan pada pilkada

2020 ini. Penerbitan PKPU No. 13 tahun 2020 bisa membuat peserta pemilu untuk tidak menggelar kampanye berpotensi kerumunan dan berharap para peserta pilkada bisa menggunakan kampanye secara virtual atau online.

Krisis pandemi Covid-19 ini masih menjadi keresahan masyarakat di Provinsi Bengkulu, namun kebijakan pemerintah pusat yang ingin tetap melaksanakan pilkada serentak 2020 membuat provinsi Bengkulu juga ikut andil. Pemilihan gubernur Provinsi Bengkulu pada Tahun 2020 ini mengusulkan tiga pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur diantaranya nomer urut (1)Rohidin-Rosjonyah, (2) Helmi-Muslihan, (3) Agusrin-Imron untuk mendapatkan sebuah kursi jabatan tentu saja setiap paslon haruslah memiliki dukungan suara dari masyarakat agar menduduki kursi Kepala Daerah dengan dibubuhi janji untuk kepentingan kesejahteraan rakyat agar mendapatkan suara yang unggul banyak hal yang dilakukan oleh masing-masing paslon seperti kampanye politik, memasang poster di baliho yang tujuan adalah agar masyarakat mengenal dengan baik paslon tersebut. Selain itu ketika berkampanye sering sekali paslon menjanjikan suatu hal yang dianggap penting untuk masyarakat ketika mereka mendapatkan dukungan dan suara yang unggul bahkan tidak sedikit

paslon menggunakan *money politics* untuk meyakinkan masyarakat agar memilihnya.

Berdasarkan pengamatan dan pengalaman terhadap proses perjalanan kampanye politik antara ketiga paslon gubernur dan wakil gubernur 2020 Provinsi Bengkulu masih tidak sesuai dengan aturan yang dibuat oleh pemerintah dan juga Komisi Pemilihan Umum. Aturan kampanye politik yang harus dilaksanakan secara virtual dengan kondisi krisis pandemi Covid-19 ini tidak dijalankan dengan baik, masih ada calon yang tetap bersikeras untuk melakukan kampanye secara langsung walaupun tidak seperti yang dahulu dengan pesta demokrasi tetapi tetap saja sesuai aturan pemerintah harus tetap dilaksanakan. Permasalahan ini yang menjadikan peneliti untuk mengkaji lebih dalam bagaimana persepsi masyarakat Kota Bengkulu pada kampanye politik yang dilaksanakan oleh masing-masing calon Gubernur dan Wakil Gubernur 2020 Provinsi Bengkulu. Tujuannya adalah mengingat bahwa banyaknya masyarakat memang sudah apatis dengan Covid-19, masyarakat tidak percaya, masyarakat menganggap Covid-19 ini adalah konsiprasi politik, apakah dengan adanya kampanye politik ini tetap berjalan membuat masyarakat semakin tidak percaya atau sebaliknya. Hal ini penting untuk dikaji agar menjadi pedoman

pemerintah dalam mensosialisasikan Covid-19 dimasyarakat. Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas adapun rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana persepsi masyarakat Kota Bengkulu pada kampanye politik calon gubernur dan wakil gubernur 2020 Provinsi Bengkulu di masa Pandemi Covid-19 ?

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Tentang Komunikasi Politik

Komunikasi merupakan bagian terpenting yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari, bahkan hampir 70 persen aktivitas manusia sebagai makhluk sosial adalah berkomunikasi baik komunikasi verbal maupun nonverbal. Banyak ahli yang menjelaskan tentang proses komunikasi seperti halnya menurut salah satu ahli komunikasi berikut ini. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari komunikator ke komunikan untuk memberikan informasi yang bertujuan mencapai kesamaan makna. Menurut Mulyana (2005) komunikasi menyarankan bahwa suatu pikiran, suatu makna, atau suatu pesan dianut secara sama.

Ruang lingkup komunikasi juga menembus dimensi politik karena kegiatan politik akan selalu berhubungan dengan aktivitas komunikasi. Menurut Nimmo

(2007) Komunikasi politik merupakan proses penyampaian pendapat, sikap dan tingkah laku orang, lembaga atau kekuatan dalam rangka mempengaruhi pengambilan keputusan politik. Secara fleksibel, komunikasi politik merupakan komunikasi yang mengacu pada kegiatan politik. Komunikasi politik ditujukan pada pencapaian tujuan, yang digunakan untuk menghubungkan pikiran-pikiran politik yang ada di masyarakat. Oleh karena itu, semua kegiatan politik yang dilakukan oleh pemerintah, organisasi politik atau kekuasaan negara beserta institusi pendukung maupun yang dilakukan rakyat pada umumnya merupakan bentuk komunikasi politik (Susanto, 2013).

Pemilihan Umum di Masa Pandemi Covid-19

Penyelenggaraan Pemilihan umum atau lebih dikenal dengan pemilu merupakan salah satu wujud implementasi dari adanya sistem pemerintahan yang demokrasi. Sistem pemerintahan yang berwujud demokrasi menempatkan rakyat di posisi yang paling tinggi yang berarti rakyat memiliki kedaulatan penuh. Kedaulatan penuh yang dimiliki oleh rakyat adalah bentuk kekuasaan rakyat dalam pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik yang mencakup kebijakan publik dan keputusan yang berkaitan dengan penentuan pejabat

publik yang diberi kewenangan untuk melaksanakan kebijakan publik (Cholisin, 2009:29).

Penyelenggaraan pemilu memiliki fungsi utama yaitu untuk menghasilkan proses politik yang benar-benar merupakan perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Penyelenggaraan pemilu berjalan secara demokratis apabila setiap warga negara Indonesia yang telah memiliki hak pilih ikut berpartisipasi menentukan pilihannya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (LUBERJURDIL) untuk mewujudkan hal tersebut, setiap rakyat harus menanamkan nilai-nilai sehingga terciptanya pemilu yang demokratis.

Pemilu yang diselenggarakan pada saat ini dirasakan sangat berbeda dari pemilu sebelumnya akibat dari adanya wabah covid-19 ini. Wabah yang melanda tidak membuat penyelenggaraan pemilu menjadi tertunda. Pemilu tetap akan dilaksanakan namun harus mematuhi protokol kesehatan dari pemerintah.

Dilansir dari koran Bengkulu Ekspres, 25 Oktober 2020 bahwa sistem pencoblosan akan dilakukan berbeda dari sebelumnya, pihak KPU Provinsi Bengkulu mensiasati dengan membuat jadwal untuk setiap orang yang akan menggunakan hak pilihnya. Selain itu untuk warga yang

terpapar Covid-19 ini juga tetap bisa menggunakan hak pilihnya, panitia Pemungutan Suara (PPS) di tempat Pemungutan Suara (TPS) kan mendatangi tempat isolasi mandiri pasien atau tempat khusus lainnya dan tentunya didampingi oleh petugas medis dan tenaga pengawas serta saksi.

Tentunya pro kontra akan muncul dengan adanya penyelenggaraan pemilu ini karena masih banyak masyarakat yang khawatir hal tersebut akan menimbulkan cluster baru.

Tinjauan Tentang Persepsi Masyarakat

1. Pengertian Masyarakat

Dalam kehidupan sosial tidak terlepas dari interaksi antar kelompok yang mana kelompok ini disebut sebagai masyarakat. Dalam bahasa Inggris masyarakat yaitu *society* yang berasal dari kata Latin *socius* yang berarti kawan. Menurut Durkheim (Suryadi 2009:38) menjelaskan bahwa masyarakat sebagai suatu kenyataan yang objektif secara mandiri, bebas dari individu-individu yang merupakan bagian dari anggota-anggotanya. Masyarakat bukan hanya sekedar suatu penjumlahan individu semata-mata, melainkan suatu sistem yang dibentuk dari hubungan antar mereka, sehingga menimbulkan suatu realita

tertentu yang mempunyai ciri-cirinya sendiri.

2. Pengertian Persepsi

Persepsi merupakan cara seseorang menginterpretasikan atau memaknai pesan yang didapatkan melalui stimulus indera. Rohim (2011:59) menyatakan bahwa persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi pertama kali muncul akibat stimulus inderawi dan dibantu oleh pengalaman. Karena setiap orang memiliki pengalaman yang berbeda-beda maka tentunya timbul bermacam-macam persepsi dan penafsiran pesan akan sesuatu yang diamati.

Menurut Simanjuntak (Robbins:2011:88) persepsi dapat didefinisikan sebagai proses dengan mana individu-individu mengorganisasikan dan menafsirkan kesan indera mereka memberikan makna kepada lingkungan mereka. Berikut adalah tahapan proses terjadinya persepsi:

1. Tahap pertama ini lebih dikenal dengan nama proses kealaman atau proses fisik yang merupakan proses ditangkapnya suatu stimulus oleh alat indera manusia.
2. Tahap ini dikenal dengan proses fisiologis yang merupakan proses diteruskannya stimulus yang diterima

oleh reseptor (alat indera) melalui saraf-saraf sensoris.

3. Tahap terakhir merupakan tahapan yang dikenal dengan proses timbulnya kesadaran individu tentang stimulus yang diterima reseptor (Walgito, 2002:15).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Menurut Sugiyono (2016:9) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Metode kualitatif deskriptif adalah jenis penelitian yang memberikan analisis dari berbagai data primer dan sekunder untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat Kota Bengkulu pada kampanye politik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 di Provinsi Bengkulu di masa krisis pandemi Covid-19.

Data yang telah dikumpulkan kemudian dilakukan analisis secara sederhana yang diawali dengan proses mengumpulkan data yaitu melalui tahapan wawancara dengan informan yaitu masyarakat Kota Bengkulu,

dilanjutkan dengan observasi non partisipan serta sumber informasi yang berasal dari dokumentasi yang mendukung. Tahapan selanjutnya yaitu proses analisis data dimana proses analisis ini dilakukan secara sederhana yang diawali pengumpulan data, membuat identifikasi data yang sesuai dengan kategorisasi yang diinginkan sehingga akan menghasilkan analisis yang komprehensif untuk mendapatkan analisis data terkait persepsi masyarakat masyarakat Kota Bengkulu pada kampanye politik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 di Provinsi Bengkulu di masa krisis pandemi Covid-19. Setelah melakukan proses analisis data kemudian melakukan pemeriksaan kembali secara keseluruhan terkait data-data yang telah dikumpulkan dengan tujuan untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam proses pengambilan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menganalisis mengenai persepsi masyarakat Kota Bengkulu pada kampanye politik pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2020 Provinsi Bengkulu pada situasi kondisi pandemi Covid-19 saat ini. Mengingat pemilu yang dilaksanakan ini

adalah pilkada serentak di beberapa provinsi di Indonesia yang salah satunya termasuk provinsi Bengkulu, yang mana pilkada serentak ini tetap dilaksanakan walaupun kondisi pandemi Covid-19 saat ini. Mengenai kampanye politik yang dilakukan tiga calon yang ada di Provinsi Bengkulu yang akan bersaing untuk mendapatkan kursi jabatan sesuai dengan standar operasional KPU RI harus sesuai dengan aturan dan tetap memperhatikan atau menjaga protokol kesehatan.

Kali pertama dalam sejarah dunia dan Indonesia melakukan pemilu dalam kondisi Covid-19 ini, tentu ini merupakan suatu masalah yang besar. Bagaimana tidak bahwa biasanya kampanye yang dilakukan itu begitu sangat meriah yang bahkan pesta demokrasi yang dilakukan mengundang beribu-ribu massa pada suatu wilayah yang menjadi tempat pesta demokrasi suatu pasangan calon dengan tujuan untuk kampanye politik. Mengingat bahwa kondisi pandemi ini masing-masing pasangan calon harus melakukan kampanye secara virtual dan sesuai protokol kesehatan, dengan tujuan untuk memutuskan tali rantai penyebaran Covid-19 di Indonesia. Menurut salah satu informan penelitian ini menjelaskan mengenai persepsinya dengan kampanye politik pasangan calon Gubernur dan

Wakil Gubernur 2020 di Provinsi Bengkulu sebagai berikut:

“Menurut saya sistem kampanye politik yang dilakukan beberapa paslon Gubernur dan Wakil Gubernur 2020 Provinsi Bengkulu belum sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh KPU RI, dan belum mematuhi protokol kesehatan sesuai dengan aturan kemenkes RI. Dimana ketika kampanye akbar beberapa waktu lalu masih banyak konvoi-konvoi di jalanan yang tidak menggunakan masker, tidak berjarak dan mengundang massa yang banyak. (Hasil wawancara informan 1)

Hal tersebut menjelaskan bahwa hal-hal yang diatur pada sistem kampanye politik pada kondisi pandemi Covid-19 ini tidak mengikuti berbagai standar protokol kesehatan, padahal sebagai calon orang yang sedang bersaing untuk mendapatkan kursi jabatan Pemprov Bengkulu harus menjadi contoh yang baik untuk masyarakat. Tujuan untuk memutus tali rantai penyebaran Covid-19 hanya menjadi pesan-pesan persuasif belaka, tetapi pada kenyataannya sistem pemerintahan itu juga yang tidak menjalankan aturan yang telah dibuat oleh mereka sendiri. Hal ini tentunya akan mengurangi tingkat

kepercayaan masyarakat pada pemerintahan.

Berkaitan dengan persepsi masyarakat terkait kondisi pandemi Covid-19 ini merubah pola hidup manusia yang hampir 70% dimana sekolah belajar dari rumah, bekerja juga dari rumah, ibadah juga pada awalnya tidak diizinkan untuk dilakukan kecuali dirumah namun pilkada serentak tetap dilaksanakan. Menurut masyarakat Kota Bengkulu yang diwawancarai menjelaskan:

“Saya tetap mendukung pilkada serentak ini tetap dilaksanakan mengingat ini merupakan pesta akbar dan pesta demokrasi yang dilakukan lima tahun sekali untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan saya tetap mendukung terselenggaranya pemilihan ini, akan tetapi setiap TPS harus mengikuti dan menetapkan protokol kesehatan yang sudah ditentukan oleh KPU RI” (Hasil wawancara informan 2)

Perjalanan pilkada ini ternyata mendapatkan respon positif oleh masyarakat dimana pilkada tetap dilaksanakan tetapi harus mengikuti protokol kesehatan terkhususnya di TPS seperti menggunakan masker, jarak yang

harus diperhatikan dan menyediakan fasilitas cuci tangan untuk masyarakat ketika melakukan pemilihan. Namun beberapa masyarakat Kota Bengkulu merespon negatif dengan pilkada serentak pada pandemi ini. Menurut beberapa informan penelitian ini yaitu masyarakat Kota Bengkulu menjelaskan bahwa mereka tidak setuju bahwa pilkada ini dilaksanakan. Mengingat kondisi pandemi belum tuntas, lantas kenapa pilkada tetap dijalankan oleh pemerintah. Pertanyaan-pertanyaan inilah yang sering muncul di masyarakat, sehingga tidak sedikit masyarakat menganggap bahwa corona virus hanya dijadikan sebagai informasi yang bersifat *hoax* atau sekedar konspirasi politik dan kepentingan pemerintah. Tentu hal ini akan meningkatkan jumlah masyarakat yang golput nantinya.

Proses pilkada serentak 2020 terlihat berbeda dengan pilkada sebelumnya. Persepsi masyarakat terlihat pada saat proses debat paslon yang terlihat lebih elegan dan profesional dibandingkan dengan tahun lalu yang mana pendukung sangat banyak yang hadir ke studio untuk menyaksikan debat kandidat secara langsung yang menyebabkan marwa dan fokus dari masing-masing calon berantakan dan efektif sehingga terlihat kurang profesional. Tetapi dengan massa

pandemi saat ini masyarakat melihat debat kandidat lebih tertata dan profesional. Dimana Saat ini masa pandemi belumlah berakhir. Mengingat masa pandemi yang belum berakhir ini lah maka munculah pendapat negatif masyarakat khususnya masyarakat yang ada di Kota Bengkulu. Mereka khawatir dengan adanya pelaksanaan pemilihan umum ini akan muncul cluster baru

Peraturan Pemerintah dan juga KPU RI No.06 Tahun 2020 atau PKPU No.06 Tahun 2020 yang berisi tentang penerapan protokol kesehatan pada setiap tahapan pilkada pada kenyataannya masih banyak sekali para pasangan calon gubernur yang tidak mengindahkan aturan tersebut, di Kota Bengkulu sendiri khususnya masih banyak sekali calon kepala daerah yang melakukan kampanye namun tidak menerapkan protokol kesehatan. Akibatnya banyak masyarakat yang percaya bahwa corona virus ini adalah hoax.

Namun ada juga yang berpendapat positif terhadap pelaksanaan pemilu ini, mengingat bahwa pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur adalah agenda yang dilaksanakan 5 tahun sekali sehingga dianggap pesta demokrasi ini tidak boleh terlewatkan momentnya meskipun dengan kondisi pandemi Covid-19 seperti yang

kita rasakan. Yang harapannya pilkada serentak tetap dilaksanakan namun tetap mematuhi protokol kesehatan yang bertujuan untuk mempersuasif masyarakat Bengkulu.

KESIMPULAN

Pada tahun ini, pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (PILKADA) jauh berbeda dari pelaksanaan pilkada yang pernah dilakukan sebelumnya akibat dari pandemi Covid-19 ini. Pesta demokrasi yang dilakukan pada saat Pandemi Covid-19 ini tidak menurunkan semangat para calon kepala daerah untuk berkampanye. Ada banyak cara yang dapat mereka lakukan untuk meraih massa tanpa harus bertatap muka ataupun melakukan konser seperti biasanya salah satunya yaitu berkampanye melalui media sosial. Namun banyak juga dari mereka yang berkampanye secara langsung yang dapat memancing kerumunan massa dan tidak menerapkan protokol kesehatan.

Adanya pandemi Covid-19 ini memaksa calon kepala daerah untuk lebih kreatif dalam berkampanye. Kampanye yang dilakukan harus memenuhi standar yang telah dibuat oleh pemerintah. Namun walaupun telah dibuat aturan dalam berkampanye, masih saja terdapat calon

kepala daerah yang tidak mengindahkan aturan tersebut. Sehingga munculah berbagai pro dan kontra dari masyarakat terhadap pelaksanaan pilkada ini yang berimbas dengan menurunnya tingkat kepercayaan mereka akan adanya pandemi Covid-19 ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Cholisin.2009. *Mengembangkan Partisipasi Warga Negara dan Mengembangkan Sistem Politik Indonesia*. Jurnal Civics, Vol.6, No. 1, Juni, 29-44
- Liando, Daud. 2016. *Pemilu dan Partisipasi Politik Masyarakat (Studi pada Pemilihan Anggota Legislatif dan Pemilihan Presiden dan Calon Wakil Presiden di Kabupaten Minahasa Tahun 2014)*. Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum Volume 3 Nomer 2
- Mulyana Deddy. 2005. Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Nimmo, dan. 2007. Political Communication and Public Opinion in America (Komunikasi Politik : Komunikator, Pesan, Media). Bandung : Remaja Rosdakarya
- Putri, Rosiana. 2015. Komunikasi Politik (Model Komunikasi Politik antar Fraksi dalam Pembentukan Norma UU Pilkada secara Demokratis). Jurisprudence, Vol. 05, No 1 Maret.
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: PT Alfabeta
- Susanto, Eko. 2013. Dinamika Komunikasi politik dalam Pemilihan Umum. Jurnal Kajian Komunikasi, Vol. 1. No 2 Des.
- Walgito, bimo. 2002. Pengantar Psikologi Umum. Yogyakarta : ANDI
- Zainal. 2015. *Persepsi Masyarakat Terhadap Partai Politik di Desa Terantang Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala*. Universitas Lambung Mangkurat.
- Internet :
- <https://news.detik.com/berita/d-5186792/nomor-urut-pilgub-bengkulu-helmi-muslihan-1-rohidin-rosjonsyah-2>